**PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI DALAM UU NO 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (PKDRT)**

Tri Sulatama Putra, SH

Alumni Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa

ABSTRACT

Coercion of sexual intercourse is basically inconsistent with good society habits. This act is not in accordance with the human conscience. There have been many rules designed to eradicate bad behavior towards women. Law No. 23 of 2004 on Elimination of Domestic Violence (PKDRT) is one form of government effort to eliminate violence in the family that most of the victims are women. Form of coercion of sexual intercourse with wife according to the Act. No. 23 of 2004 is (1) Unwelcome sexual intercourse of wife due to lack of wife willingness in physical and psychic form. (2) Unwelcome sexual intercourse of a wife, for example, to marry his wife in a drunken husband, to marry a wife while the wife is sleeping wife has never felt inner satisfaction because of the impact of uncomfortable husband's treatment during sex. coercion of a wife's sexual relationship in a state of illness or in a state of wife coming months.

Keywords: *coercion, sexual intercourse, wife*

PENDAHULUAN

Dalam perspektif agama secara makro, pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama diturunkan oleh Tuhan ke bumi tentu saja tidak hanya diturunkan begitu saja, karena di dalam agama tersebut ada pesan-pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi. Agama turun disaat-saat dehumanisasi terjadi secara sadis ditengah-tengah komunitas sosial dalam masyarakat Arab Jahiliyah, yang hidup diatas perbudakan yang menghancurkan nalar kemanusiaan. ¹

Pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri.²

¹ Sri Suhandjati Sukri, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Media Gama, 2008), h. 158

² Maria Milda, *Kekerasan seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 200), h. 4

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita.³

Pemuasan hasrat seksual merupakan salah satu alasan utama perkawinan. Namun makna perkawinan sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar seks. Perkawinan juga mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis. Suami istri harus dekat dan akrab secara fisik, psikologis dan emosional. Saling bersimpati dan saling memperlakukan dengan baik dapat melanggengkan cinta bahkan ketika masa-masa “penuh gairah”.⁴

Islam melarang pemaksaan hubungan seksual, suami harus menggauli istrinya dengan ma’ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya pemaksaan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya.

Sebelum disahkannya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara khusus mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehubungan dengan judul ini yang membahas masalah kekerasan fisik, maka secara umum kekerasan fisik yang lazim disebut dengan penganiayaan telah diatur secara rinci dalam pasal 351 KUHP.

Kehadiran UU PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus PKDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban. Dimana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorangpun diluar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Lebih kurang 4 tahun sejak pengesahannya pada tahun 2004, dalam perjalanannya UU ini masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. PP NO 4 Tahun 2006 tentang Pemulihan merupakan peraturan pelaksana dari UU sebagaimana yang tertera dalam mandate UU ini.⁵

³ Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), h. 8.

⁴ Ibid, h.32.

⁵ Ibid, h. 39.

Islam tidak pernah membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Karena islam adalah agama yang mempunyai nilai-nilai prinsipil seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nisa: 19)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

Artinya: Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi).⁶

Maka perindahlah ucapan terhadap mereka (para pria) serta perbaguslah perilaku dan penampilan sesuai kemampuan. Sebagaimana engkau menyukai bila ia (istri) berbuat demikian, maka engkau (semestinya) juga berbuat yang sama. Karena para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Buatlah wajahnya senantiasa berseri-seri, suka bersenda gurau dan bercumbu rayu dengan istri, bersikap lemah-lembut terhadap mereka dan melapangkan mereka dalam hal nafkah serta hubungan seksual, perlakukan istrinya secara baik

⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Darul Fkr) 2/450

mengumpulkan para istrinya dan ajak berbincang-bincang sejenak dengan istri sebelum menggaulinya. Adanya saling keterbukaan antara suami istri, suami akan mengerti tentang keadaan kondisi istri begitu juga istrinya memberikan saran kepada suami, kalau komunikasi berjalan dengan baik maka tidak akan terjadi pemaksaan hubungan seksual.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri dalam masyarakat patriarkhis selalu dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan lumrah. Bahkan oleh sebagian masyarakat KDRT terhadap istri hampir selalu diterjemahkan sebagai bentuk pengajaran suami terhadap istri dalam rangka pembinaan rumah tangga. Dan yang lebih parah lagi masyarakat sering melegitimasi kekerasan tersebut dengan dalih agama.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut (Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk member rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual ini berlaku juga bagi pasangan suami-istri. Suami tidak bisa memaksakan keinginannya untuk berhubungan seksual dengan istrinya, apabila istrinya tersebut melakukan

⁷ UU No 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT pasal 1, ayat 1

penolakan, begitupun sebaliknya. Termasuk juga dalam kategori kekerasan seksual dalam pengertian pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau gaya berhubungan dengan tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri.

Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita.⁸ Dalam Hukum Islam seorang istri tidak boleh menolak apabila suami menginginkan hubungan intim, sebagaimana bunyi hadist dari Abu Hurairah.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: *“Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri tidak mendatanginya, hingga dia (suaminya) bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut menunjukkan wajibnya seorang wanita memenuhi keinginan suami dalam masalah jima’, sekalipun sang istri dalam keadaan sibuk dengan urusan rumah yang penting, tidak boleh meninggalkan suami atau bersikap masa bodoh terhadapnya.

Selama ini kekerasan suami terhadap istri dalam pemaksaan hubungan seksual jarang mendapat perhatian masyarakat. Suami yang memaksakan hubungan senggama jarang dimunculkan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam masyarakat dan keluarga menjadi salah satu penyebabnya serta bagi istri sendiri hal itu merupakan aib bagi keluarganya.⁹ Lebih lebih peran publik yang berasumsi laki-laki punya hak otonom dalam keluarganya membuat laki-laki berhak melakukan apa saja terhadap perempuannya, dan kebanyakan laki-laki menganggap bahwa

⁸ Maria Milda, *Kekerasan seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 200), h.4

⁹ Masdar F Mashudi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2004), h. 116.

perkawinan merupakan legitimasi resmi kekuasaan terhadap perempuan. Adapun asumsi dasar dari tokoh agama Kota Langsa terhadap pro dan kontra pemaksaan hubungan seksual terhadap istri adalah bahwa sebagian tokoh agama menilai bahwa seorang suami mempunyai hak terhadap istri dengan dalil surat Al-Baqarah 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنْوُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّؤَفَّوهُ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۲۲۳

Artinya: *Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al Baqarah: 223)*

Pemaksaan Hubungan Seksual

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.¹⁰

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan

¹⁰ YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. (Jakarta: Sentralisme Production. 2007), h/ 34.

¹¹ Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang P-KDRT, Pasal 1 ayat 1.

cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktifitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.¹²

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dikategorikan sebagai tindakan *marital rape*, adapun pengertian dari *marital rape* itu sendiri beragam. Menurut Nurul Ilmi Idrus, dalam laporan penelitiannya mendefinisikan bahwa *marital rape* hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat-obat terlarang atau minuman beralkohol.⁸ Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkannya kedalam 3 bagian, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri. Berdasarkan beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat dirumuskan bahwa yang termasuk katagori tindakan *marital rape* adalah:¹³

1. Hubungan seksual yang dilakukan secara paksaan atau dengan kekerasan, karena istri dalam keadaan tidak siap atau lelah sehingga mengakibatkan istri mengalami luka fisik atau psikis.
2. Hubungan seksual yang dilakukan tanpa memperhatikan kepuasan ataupun kenikmatan keduanya. Katagori di atas tidak mutlak termasuk ke dalam tindakan *marital rape* karena setiap saat tindakan *marital rape* dapat berubah dan semakin variatif bentuknya.

Pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga (di ruang domestik). Terkait kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (di ruang domestik), terutama

¹² Abdul Muqit Ghazi, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, (Jakarta: Rahima, 2002, Cet. 1,) h. 105.

¹³ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dan Kehidupan Rasul* (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998),h. 24-25.

kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri (*wife abuse*) mempunyai berbagai macam bentuk dan jenisnya. Obyek kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan (istri) tapi tidak dipungkiri juga seorang suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan. Adapun yang termasuk dalam katagori bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah perkosaan, pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan, perdagangan perempuan, dan melarikan perempuan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan secara khusus dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia yang menyatakan bahwa yang termasuk kekerasan terhadap perempuan itu adalah sebagai korban dan (a) perkosaan, (b) pengguguran kandungan tanpa seizing yang bersangkutan, (c) perdagangan perempuan, dan (d) melarikan perempuan. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender mempunyai macam dan bentuk kejahatan, di antaranya:¹⁴

1. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrealan ini sering kali tidak bisa diungkapkan karena berbagai faktor, misalnya: ketakutan, rasa malu, keterpaksaan ekonomi, sosial, maupun kultural.
2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).
3. Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*).
4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan.

¹⁴ Mansor Fakhri, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.7

5. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi termasuk kekerasan nonfisik berupa pelecehan terhadap kaum perempuan karena tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (*enforced sterilization*).
7. Kekerasan terselubung (*molestation*) berupa memegang atau menyentuh bagian dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Kekerasan ini sering terjadi ditempat pekerjaan atau tempat umum

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Adapun bentuk kekerasan ini dapat diwujudkan dengan perilaku pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan atau yang tidak disukai, merusak organ reproduksi perempuan, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan melakukan hubungan seksual yang tidak menghiraukan kondisi istri.¹⁵

Bentuk kekerasan inilah yang termasuk dalam katagori tindakan pemaksaan hubungan seksual (aktivitas seksual tanpa persetujuan) yang dikarenakan kondisi istri atau sebaliknya dalam keadaan kurang sehat, lelah atau tidak siap. Ketidaksiapan istri atau kondisi yang tidak sehat dalam melakukan aktivitas seksual, merupakan suatu hal yang sengat diperhatikan dalam melakukan hubungan seksual karena hal tersebut merupakan salah satu faktor agar kedua belah pihak ketika melakukan hubungan seksual merasakan kepuasan atau kenikamatan dan aktivitas seksual tersebut, dan bukan hanya salah satu pihak saja yang merasakan. Hal seperti inilah dari kedua pihak perlu adanya interaksi aktif agar dalam melakukan hubungan seksual suami istri saling mengerti keadaan masing-masing.

Bentuk yang lumrah terjadi dalam rumah tangga dapat diringkas kedalam 3 bentuk yaitu: (a) kekerasan sikap, merendahkan, (b) kekerasan bahasa, memaki dan mengintimidasi, (c) kekerasan fisik, menjambak, memukul, dan menendang. Dan, salah satu bentuk kekerasan yang kerap

¹⁵ *Ibid*, h. 9

terjadi di dalam rumah tangga adalah pemaksaan aktivitas atau selera seksual tanpa memperhatikan kondisi istri. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan ragam dan kelanjutan kekerasan berdasar gender. Kekerasan berdasar gender menyudutkan kemanusiaan perempuan ke titik nadir.

ANALISIS UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktifitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dikategorikan sebagai tindakan *marital rape*, adapun pengertian dari *marital rape* itu sendiri beragam.

Marital rape hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat-obat terlarang atau minuman beralkohol. *Marital rape* dibagi kedalam 3 bagian, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi

¹⁶ Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang P-KDRT, Pasal 1 ayat 1.

penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.

Berdasarkan pada beberapa pengertian secara teoritis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dirumuskan ke dalam kategori *marital rape*. Adapun bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut: (1) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya Mengauli istrinya dalam keadaan suami mabuk, Menggauli istri pada saat istri sedang tidur Istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karna dampak dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat berhubungan seks. pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri datang bulan.

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No. 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi penyimpangan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain. Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suami istri dalam perspektif UU No. 23 tahun 2004, dapat diidentifikasi sebagaimana uraian berikut ini. UU kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam RUU KUHP baru tidak jadi diundangkan, karena pakar hukum yang tergabung dalam panitia khusus RUU KUHP telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai *marital rape* dengan alasan karena masyarakat belum siap menerima pasal yang kontroversial

Berbeda dengan KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam UU tersebut tidak ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam UU tersebut ada kata-kata untuk kekerasan

seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga pada pelaku didalam rumah tangga.

UU No. 23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan) tidak hanya terjadi di luar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi. Namun harus disadari pula bahwa setiap korban mau melaporkan tindakan pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) yang dialaminya. Banyak sebab yang membuat para korban enggan untuk melapor. Sebagian dari mereka menganggap bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan domestik, yang publik tidak berhak untuk ikut campur.

Menurut penulis, kaum pria lebih cenderung mengekspresikan kemarahan dan frustrasi dalam bentuk-bentuk pemaksaan sehingga mereka lebih dipandang sebagai pasien “akut”. kaum wanita lebih banyak didiagnosa menderita depresi. Karena bentuk-bentuk emosi relative dapat dilampiaskan lebih cepat melalui ngamuk, maka penurunan tingkat ngamuk dapat dipandang sebagai tanda kesembuhan”, sehingga pria dipulangkan lebih cepat. Ini hanya spekulasi peneliti. Namun mungkin juga pihak keluarga menginginkan kepulangan mereka karena alasan financial, karena kaum pria lebih dipandang sebagai pencari nafkah dibanding wanita.

Di sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang di adopsi majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah:

1. Tindakan pemaksaan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami-istri, serta pemaksaan yang berhubungan dengan eksploitasi
2. Pemaksaan seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan

ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya.

3. pemaksaan secara seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.

Pemaksaan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencangkup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

Jika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, negara (baca: pemerintah) enggan untuk ikut campur karena dipandang sebagai urusan rumah tangga yang seharusnya diselesaikan sendiri. Pasal 285 KUHP ini juga membatasi ketentuan pemaksaan hubungan seksual hanya dalam bentuk persetubuhan, padahal banyak cara pemaksaan yang dilakukan diluar bentuk tersebut (lihat bagian sebelumnya 'seperti apa pemaksaan hubungan seksual yang pernah terjadi?'). Berdasarkan pasal 5 UU PKDRT, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Secara lebih khusus, dalam pasal 8 dijelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 8 huruf a UU PKDRT di jelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Mengenai hukuman bagi pelaku, ditegaskan dalam pasal 46 UU PKDRT ini yang menyatakan para pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga diancam hukuman pidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) atau denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Hal yang harus dilakukan seorang istri jika mengalami pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pertama, Anda harus sadar bahwa adalah hak Anda untuk menolak hubungan seksual yang tidak Anda inginkan. Sehingga, jika suami mengajak berhubungan disaat Anda sedang tidak ingin, Anda harus berani untuk menolak dan mengutarakan alasan Anda. Bicarakan dengan baik-baik, apakah Anda lelah, sedang haid atau Anda tidak menyukai gaya suami berhubungan seks. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting terutama agar pasangan saling mengetahui keinginan masing-masing.
2. Jika suami tetap memaksa bahkan sampai melakukan kekerasan baik fisik atau psikis, maka Anda jangan diam saja. Kesedihan sebaiknya jangan Anda pendam sendiri. Anda dapat menghubungi teman atau keluarga yang Anda percaya untuk menceritakan mengenai hal ini. Selain itu Anda juga dapat menghubungi Lembaga Bantuan Hukum dan Pusat Krisis untuk Perempuan dan Anak berikut ini untuk meminta informasi dan juga pendampingan. Beberapa diantaranya adalah: Lembaga Pelindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Sapujagad, KOMNAS HAM, Perlindungan Perempuan.
3. Anda juga dapat melaporkan kejadian yang Anda alami ke kepolisian (RPK). Dengan adanya UU PKDRT, pihak kepolisian tidak dapat lagi mengatakan bahwa yang Anda hadapi adalah urusan pribadi dan kemudian menyuruh Anda pulang. Sebaliknya, polisi harus segera melindungi Anda.
4. Sebelum melapor, sebaiknya Anda mengetahui hak-hak Anda sebagai korban KDRT berdasarkan pasal 10 UU PKDRT): Mendapatkan perlindungan dari kepolisian, pengadilan, lembaga sosial, keluarga dan pihak lainnya terutama jika Anda merasa bahwa pelaku kerap menjerogok dan mengintimidasi Anda.
5. Pelayanan kesehatan, jika Anda membutuhkan penyembuhan secara fisik maupun psikis (jiwa). Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
6. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, pelayanan bimbingan rohani.

Sudah saatnya sekarang, masyarakat memahami bahwa pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam perkawinan adalah juga bentuk kejahatan perkosaan yang tidak akan lepas dari hukuman.

PENUTUP

Bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap istri menurut UU No. 23 tahun 2004 adalah (1) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya Mengauli istrinya dalam keadaan suami mabuk, Menggauli istri pada saat istri sedang tidur Istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karna dampak dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat berhubungan seks. pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri datang bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muqsit Ghozi, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, Jakarta: Rahima, 2002, Cet. 1.

Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dan Kehidupan Rasul*, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998.

Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Darul Fkr.

Maria Milda, *Kekerasan seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS, 2000.

Masdar F Mashudi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2004.

Mansor Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Sri Suhandjati Sukri, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Media Gama, 2008.

UU No 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT pasal 1, ayat 1.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang P-KDRT, Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang P-KDRT, Pasal 1 ayat 1.

YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Sentralisme Production. 2007.